

SIMBOLISME DAN ESSENSIALISME KEPEMIMPINAN (KAJIAN FIKIH SIYASAH TENTANG SOSOK PEMIMPIN IDEAL MENURUT ISLAM)

Agus Sunaryo

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

Email: abikhaidar@gmail.com

Abstrak:

Setiap masyarakat pasti mendambakan lahirnya sosok pemimpin yang ideal untuk menjalankan roda pemerintahan. Sebab, hanya melalui pemimpin yang ideal, harapan dan cita-cita hidup berbangsa dan bernegara bisa terwujud. Namun demikian, mencari seseorang yang diyakini ideal untuk memimpin, bukanlah persoalan mudah. Dalam konteks Islam, perjalanan sejarah politik negara-negara Islam atau negara-negara dengan penduduk muslim mayoritas, terbukti belum mampu mewujudkan suatu pemerintahan yang benar-benar berhasil untuk membawa masyarakatnya menjadi masyarakat yang maju, damai dan sejahtera. Yang ada justru masyarakat Barat, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, mampu menguasai peradaban di zaman sekarang dan memposisikan Islam dengan segala peradabannya di zona periferi peradaban masyarakat modern. Artikel ini akan membahas diskursus kepemimpinan Ideal menurut Islam. Fokus kajian akan diarahkan untuk menganalisa konstruksi pemikiran yang cenderung simbolis dalam menetapkan kriteria ideal bagi seorang pemimpin. Demikian pula konstruksi pemikiran yang lebih esensial tentang kepemimpinan juga akan dibahas dalam artikel ini.

Kata kunci: Ideal, pemimpin, politik, simbolis, esensialis

Abstract:

Every society looks forward to having an ideal leader to run the country. It is through the ideal leader that the society's dreams and hopes will come true. Nevertheless, such kind of leader is

very rare. It has not been found yet within the history of moslem majority countries, such leader who can bring his society into a civilized, peaceful, and prosperous. On the contrary, Western countries could make it in that it puts the moslem countries into a periferi position within modern civilization context. This writing deals with the discourse on the ideal leader seen from Islam perspective. It analyzes the thought construction which tends to be very symbolic related to the criteria of an ideal leader. It also adresses the more essential thought construction pertaining to leadership.

Keywords: *Ideal, leader, politic, symbolic, essential*

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang secara naluriah tidak mungkin bisa bertahan hidup tanpa keberadaan orang lain. Oleh karenanya, keberadaan manusia di tengah-tengah suatu komunitas, kaum atau masyarakat adalah hal yang niscaya dalam upaya meningkatkan kualitas, harkat dan martabat kehidupan. Hal inilah yang dibahasakan oleh al-Farabi dengan ungkapan *al-insānu ḥayawān ijtimā'iy*, manusia adalah makhluk sosial dan politik.¹ Secara sosial, setiap manusia membutuhkan keberadaan orang lain untuk menyempurnakan kehidupannya, dan secara politis mereka selalu dihadapkan pada kenyataan pentingnya suatu rencana, strategi, metode atau apapun namanya agar kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik, tertib dan tidak saling merugikan satu sama lain.

Dalam konteks kesadaran alamiah tersebut, keberadaan sebuah negara atau institusi pemerintahan menjadi sangat dibutuhkan. Sebab, untuk mengelola interaksi sosial, ekonomi maupun politik antar anggota masyarakat tidak mungkin bisa dilakukan tanpa adanya suatu sistem yang mengaturnya. Dalam hal ini, negara atau institusi pemerintahan memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut.

Untuk mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang ideal bukanlah persoalan yang mudah. Salah satu syaratnya adalah harus ada sosok pemimpin yang ideal, yaitu pemimpin yang benar-benar berkualitas, baik secara personal maupun manajerial. Ia tidak hanya sempurna secara fisik, tetapi juga memiliki kecakapan dalam memimpin.

Islam, diyakini sebagai agama yang tidak hanya berurusan dengan persoalan-persoalan *ritual-peribadatan* semata, namun lebih dari itu, juga mengatur bagaimana

¹Jamil Shaliba, *Tarikh al-Falsafah al-Arabiyyah*, (Beirut: As-Syirkah al-Alamiyah li al-Kitab, 1989), h. 168.

membangun sebuah bangsa atau negara. Tidak berlebihan jika beberapa ulama sering menyebut ungkapan *al-Islam din wa dawlah*, yaitu Islam yang tidak hanya dipahami sebagai aturan agama, melainkan juga sistem pemerintahan.²

Yang menarik dalam perbincangan mengenai Islam dan negara adalah ketika konteks “keislaman” harus ditarik dalam kutub pluralitas dan religiusitas, seperti di Indonesia. Di satu sisi, negara Indonesia dibangun atas dasar semangat nasionalisme dan pluralisme, namun disisi lain mayoritas penduduk bangsa ini adalah komunitas muslim. Oleh karenanya, persoalan mengenai dasar negara, kepala negara dan sistem pemerintahan selalu menjadi wacana yang sepertinya tidak pernah habis untuk didiskusikan.

Selain itu, persoalan mengenai *simbolisme* dan *esensialisme* dalam menterjemahkan makna “keislaman” bagi masyarakat muslim di Indonesia juga belum menemukan bentuk akhirnya. Perdebatan mengenai apakah pemimpin bangsa ini harus muslim atau boleh dari kalangan non muslim?, atau, haruskah bangsa ini selalu dipimpin oleh seorang laki-laki, sementara perempuan tidak boleh memimpin?, termasuk juga, apakah pemimpin bangsa ini harus orang yang sempurna fisiknya, sementara mereka yang *difable* tidak punya hak untuk menjadi pemimpin?, dan beberapa persoalan lain, selalu menjadi isu politik, khususnya ketika akan terjadi pergantian kepemimpinan, baik di tingkat daerah maupun pusat. Padahal, selain beberapa persoalan *simbolik* ini masih banyak isu-isu kepemimpinan yang lebih *substansif* dalam rangka membangun bangsa dan negara seperti, pemimpin yang adil, pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan, pemimpin yang tidak berperilaku korup, pemimpin yang menegakkan nilai-nilai hukum dan lain sebagainya.

B. Pemimpin Ideal dalam Teori Politik Islam (*Fikih Siyarah*)

Setiap masyarakat pasti menginginkan adanya sistem pemerintahan yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi warganya. Sistem ini, menurut al-Farabi diistilahkan dengan *al-madinah al-fadilah* (negara ideal), yaitu sistem pemerintahan yang berupaya menjadikan interaksi dan kerjasama

²Ibnu Taymiyyah bahkan pernah mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan adalah salah satu dari sekian kewajiban agama. Bahkan, agama akan sangat sulit ditegakkan tanpa adanya pemerintahan. Lihat Ibn Taymiyyah, *Majmu' Fatawa*, (t.tp: Wizarah asy-Syu'un al-Islamiyah wa al-Awqaf wa ad-Da'wah wa al-Irsyad bi al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Su'udiyah, t.th)

antar anggota masyarakat sebagai pilar tercapainya kebahagiaan yang hakiki. Dalam sebuah *negara ideal*, masing-masing anggota masyarakat memiliki peran dan fungsi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun demikian, perbedaan fungsi dan peran ini tidak kemudian dimaknai sebagai sebuah *distingsi* untuk menjalin hubungan dan kerjasama. Justeru, dengan adanya perbedaan peran dan fungsi, masing-masing anggota masyarakat dapat saling melengkapi satu sama lain, menutup kekurangan yang satu dengan kelebihan yang lain atau bisa saling menyadari akan keterbatasan masing-masing.³

Dalam diskursus keislaman, persoalan bagaimana membangun sebuah negara ideal, hampir selalu terjebak pada perdebatan mengenai standarisasi ideal dari sebuah negara. Apakah standarisasi ideal tersebut diukur dengan formalisasi dalam bentuk sebuah negara, sehingga hukum-hukum Allah benar-benar dapat dilaksanakan, atau bisa saja sebuah negara dikategorikan ideal ketika nilai-nilai ajaran Islam mampu menjadi *spirit* untuk menjalankan roda pemerintahan meskipun tidak diformalkan dalam bentuk sebuah negara Islam, hingga saat ini kedua persoalan ini masih menjadi perdebatan.

Jika mengacu pada ayat-ayat al-Qur'an, maka nampak bahwa porsi pembicaraan mengenai model negara atau pemerintahan tidak begitu intens disebutkan. Dari sekitar 6236 ayat yang terdapat dalam al-Qur'an, persoalan negara dan pemerintahan hanya disebutkan dalam Sekitar 25 ayat. Inipun hanya membahas prinsip-prinsip dan garis besarnya saja.⁴ Oleh karena itu, sangat wajar jika kemudian tidak tercapai kata sepakat ketika mendiskusikan tipologi negara atau pemerintahan yang ideal.

Sebuah negara ideal selalu meniscayakan adanya pemimpin yang ideal, yaitu pemimpin yang dalam dirinya terpenuhi kecakapan untuk memimpin. Kecakapan ini bisa bersifat naluriah (*given*) dan bisa juga bersifat *malakah irâdiyyah* (*by effort*).

Menurut beberapa ulama, kriteria seorang pemimpin ideal tercermin dalam beberapa karakter berikut, yaitu:

1. Memiliki unsur-unsur kepemimpinan secara sempurna, seperti: muslim, laki-laki, merdeka, balig dan berakal.

³Jamil Salibâ, *Tarikh*, h. 169-170.

⁴Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ilm Usûl Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Qalam, 1978), h. 32-33.

2. Memiliki pengetahuan untuk mengatur persoalan-persoalan terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Memiliki kemampuan memahami sesuatu dengan baik (*capacity of understanding*).
4. Memiliki kemampuan menghafal yang baik (*capacity of memorizing*).
5. Memiliki kecerdasan di atas rata-rata.
6. Memiliki kemampuan retorika yang baik.
7. Mencintai ilmu pengetahuan dan mau terus belajar.
8. Memiliki kehormatan diri untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan hukum.
9. Mencintai kejujuran.
10. Berjiwa besar.
11. Tidak berorientasi pada kekayaan materi.
12. Mampu berlaku adil.
13. Memiliki karakteristik personal yang kuat, seperti: memiliki keberanian, patriotisme, dan teguh dalam melaksanakan aturan hukum.
14. Sempurna secara fisik.
15. Mampu menatap masa depan dengan baik (*visioner*) dan sanggup menyusun strategi untuk mencapainya.
16. Harus keturunan Quraisy.⁵ Untuk syarat yang terakhir ini didasarkan pada hadis Nabi yang artinya "para pemimpin atau imam-imam harus keturunan Quraisy" (HR. Imam Ahmad).

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, nampak sekali bahwa untuk mencari seorang pemimpin yang ideal, bukanlah persoalan mudah. Bahkan al-Farabi sempat mengatakan bahwa sangat sulit bisa menemukan seseorang yang dalam dirinya terpenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas. Barangkali hanya para Rasul

⁵Abû Hasan al-Mâwardi, *Al-Ahkâm al-Sultâniyyah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 6. Lihat juga pemikiran al-Fârabi dalam Jamil Salîbâ, *Târîkh*, h. Lihat juga Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2010), VI/ 600-604. Khusus untuk syarat yang terakhir didasarkan pada hadis Nabi yang artinya "para pemimpin atau imam-imam harus keturunan Quraisy" (HR. Imam Ahmad). Lihat Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Alam al-Kutub, 1998), III/129.

dan para filosof lah yang benar-benar mampu mencapai kapasitas tersebut.⁶ Untuk itu, al-Farabi membuat semacam *gradasi* dari kriteria-kriteria yang telah di buatnya menjadi empat, yaitu: 1) memiliki sifat bijaksana, 2) mengetahui dan mampu menjaga ketentuan-ketentuan agama (syariat), 3) mampu melakukan terobosan-terobosan pemikiran terkait dengan persoalan-persoalan baru, 4) menguasai metodologi pemikiran yang dikembangkan oleh orang-orang terdahulu dan mengkontekstualisasikannya sesuai perkembangan zaman, 5) memiliki rasionalitas yang baik terhadap ketentuan-ketentuan sebelumnya, dan 6) memiliki kesempurnaan dan kecakapan fisik yang baik.⁷

Dari semua kriteria yang ditetapkan oleh ulama di atas, sebenarnya bermuara pada empat kualitas, yaitu:

1. *Kualitas religius.*

Kualitas religius nampak dari kriteria bahwa seorang pemimpin haruslah muslim, memiliki wawasan pengetahuan agama yang luas dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan agama dengan baik.

2. *Kualitas fisik*

Berkenaan dengan kualitas fisik, az-Zuhayly menjelaskan bahwa seorang pemimpin haruslah orang yang sempurna secara fisik. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, seseorang yang tidak sempurna secara fisik (cacat) juga berhak menjadi pemimpin. Menurut az-Zuhayli, cacat fisik dalam hal kepemimpinan dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) cacat panca indera, 2) cacat anggota tubuh selain panca indera, dan 3) cacat dalam menjalankan roda pemerintahan. Masing-masing dari ketiga cacat ini ada yang berdampak pada terhalangnya seseorang untuk mencalonkan diri menjadi pemimin, ada yang berdampak pada harus berakhirnya masa kepemimpinan dan ada yang tidak berdampak sama sekali, baik terhadap hak untuk mencalonkan diri atau keharusan untuk berhenti menjabat.⁸

⁶Jamil Salibā, *Tārīkh*, h. 174.

⁷*Ibid.*

⁸Uraian selengkapnya lihat Az-Zuhayli, *Al-Fiqh*, h. 603-604.

3. *Kualitas intelektual*

Kualitas intelektual seorang pemimpin dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: 1) kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan (tidak hanya ilmu agama), 2) kecakapan dalam berbicara dan menyusun konsep, 3) keluasan ilmu pengetahuan (tidak hanya ilmu agama), 4) kemampuan menyusun visi dan misi.

4. *Kualitas moral*

Jika mengacu pada beberapa karakteristik di atas, maka kualitas moral seorang pemimpin terlihat pada: a) kecintaannya pada keadilan, b) tidak berorientasi pada materi, c) menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan hukum, dan d) memiliki keberanian serta patriotisme.

Apabila dalam diri seseorang telah terpenuhi empat kualitas di atas, maka dia memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Namun demikian, teori politik Islam mengatur sebuah mekanisme bahwa keterpilihan seseorang menjadi pemimpin ditentukan oleh proses pemilihan yang dilakukan oleh *ahl al-halli wa al-aqdi*, yaitu komunitas elit (*al-mukhtassûn*) yang terdiri dari para ahli dan pejabat pemerintahan yang dipercaya sebagai representasi dari suara rakyat untuk menentukan seorang pemimpin.⁹ Jika mereka telah menetapkan pilihan terhadap seseorang, maka kewajiban setiap warga masyarakat untuk tunduk dan patuh. Sebab, pemimpin yang dipilih berdasarkan mekanisme ini adalah termasuk *waliy al-amri*,¹⁰ dimana setiap orang yang beriman diwajibkan untuk taat kepadanya. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ....

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kalian”¹¹

Persoalannya kemudian adalah bagaimana mungkin di zaman sekarang lahir sosok manusia dengan karakteristik yang mencakup empat kualitas tersebut?

⁹Ibid, h. 593.

¹⁰Lihat, Imam Ghazali Said dan A. Ma'rud Ansori (Peny), *Solusi Problematika Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-1999)*, (Surabaya: LTNU Jawa Timur dan Penerbit Diantama, 2005), h. 283.

¹¹Q.S. An-Nisâ' (4): 59.

Jika al-Farabi mengatakan bahwa kualitas-kualitas tersebut hanya ada pada diri para Rasul dan filosof, maka ini berarti tidak ada lagi sosok pemimpin ideal sebagaimana disebutkan di atas. Namun demikian, ada tidaknya sosok ideal untuk menjadi pemimpin, yang pasti roda pemerintahan harus tetap ada dan sosok yang memimpinya juga harus terpilih. Pada titik inilah perdebatan mengenai kepemimpinan di era modern semakin menguat.

C. Pemimpin “yang simbolik” dan “yang esensial”

Secara umum, diskursus tentang Islam dan negara telah melahirkan setidaknya dua teori besar dalam kajian politik Islam. *Teori pertama* mengacu pada terbentuknya sebuah negara Islam (*dawlah islamiyyah*) yang hingga saat ini belum menemukan format idealnya, kecuali hanya dipahami sebagai sebuah negara teokrasi yang bertugas mengawal pelaksanaan hukum Islam (syariat) secara ketat dan *rigid*. Teori ini kemudian mendapat reaksi dari beberapa kalangan, khususnya pasca wacana nasionalisme mulai menguat di belahan Asia dan Afrika, yang kemudian memunculkan teori tandingan berupa konsep *nation state* (negara bangsa) yang oleh kelompok pendukung teori pertama diklaim sebagai sekuler.¹²

Jika kelompok pertama berusaha melakukan formalisasi agama dalam bentuk sebuah institusi negara Islam, maka kelompok kedua cenderung berusaha untuk melakukan transformasi nilai-nilai agama dalam sebuah negara bangsa (*nation state*). Dengan demikian, bentuk negara tidaklah harus Islam dalam pengertian formal. Yang pasti, apapun bentuk negara atau pemerintahannya, ia harus mampu mampu menterjemahkan dengan baik aspek moralitas dan etika sosial yang terkandung dalam ajaran Islam, meskipun harus berbentuk *nation state*.¹³

Baik *dawlah islamiyyah* maupun *nation state*, keduanya seolah-olah berebut legitimasi dari umat Islam sebagai model pemerintahan yang ideal di zaman modern. Namun demikian, hingga saat ini keduanya terbukti belum mampu mengembalikan kejayaan Islam seperti yang pernah diraih pada era keemasannya.¹⁴

¹²Abd Salam Arif, “Politik Islam antara Aqidah dan Kekuasaan Negara”, dalam A. Maftuh Abegebriel dkk., *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia*, (Jogjakarta: SR-Ins Publishing, 2004), h. 2.

¹³Dalam konteks kehidupan pasca era kolonialisme, pilihan terhadap konsep *nation state* dipandang lebih rasional daripada konsep *dawlah islamiyyah*. Lihat *Ibid.*, h. 2-3.

¹⁴Titik puncak kejayaan Islam ada pada dua masa, yaitu: pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyyah. Untuk mengetahui bagaimana kondisi umat Islam pada kedua masa ini, Ahmad Amin,

Memang benar bahwa kejayaan Islam pernah diraih ketika model *dawlah islamiyyah* dijadikan sebagai sistem pemerintahan kala itu. Jika demikian, maka ini bisa saja dimaknai bahwa model itu hanya cocok untuk zaman sebelum modern dan berlaku hanya untuk daerah Arab. Sebab beberapa ahli justeru melihat bahwa model pemerintahan yang menjadikan Islam sebagai negara lebih banyak menemukan kegagalan, khususnya pasca menguatnya relasi antara dunia Islam dengan modernitas (Barat). Hingga saat ini, mungkin hanya Iran yang dianggap mampu bertahan dan menunjukkan eksistensinya sebagai negara Islam di mata dunia. Selain Iran, semua *dawlah islamiyyah* dipandang gagal dalam membawa kehidupan umat Islam menjadi lebih baik. Bahkan, Iran sendiri sering kali harus dihadapkan pada serangkaian konflik, baik internal maupun eksternal. Ideologinya yang Syi'ah juga semakin menyudutkan Iran, sebab mayoritas *dawlah islamiyyah* yang ada di semenanjung Arab berideologi Sunni.¹⁵

Adapun umumnya negara-negara berpenduduk muslim non Arab, cenderung memilih konsep *nation state* sebagai model pemerintahan, dan Indonesia adalah salah satunya. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar ke dua di dunia, rakyat Indonesia bisa saja memilih *dawlah Islamiyyah* sebagai model pemerintahan. Namun demikian, semangat kebangsaan dan realitas kemajemukan, mendorong masyarakat Indonesia untuk menjatuhkan pilihan kepada model *nation state* dari pada terjebak pada formalisasi agama dalam simbol negara.

Persoalan mengenai model negara apakah harus Islam atau tidak sebenarnya dapat dipahami dari perspektif “simbol” atau “esensi” dari konsep Islam dan negara. Dalam perspektif *simbolik*, Islam harus diformalkan menjadi sebuah negara dengan segala perangkat aturannya. Namun dalam perspektif *esensialis*, Islam tidak harus diformalkan dalam bentuk sebuah negara, tetapi nilai-nilainya bisa ditransformasikan dalam kerangka sebuah negara.¹⁶

Tidak hanya menyangkut model pemerintahan atau negara, masalah *simbol* dan *esensi* ini juga seringkali mewarnai diskursus kepemimpinan. Di Indonesia

Duhâ al-Islâm, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), I/13-15. Lihat juga Philip K. Hitti, *History of The Arab*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Serambi, 2005), h. 235-540.

¹⁵Lihat Oliver Roy, *The Failure of Political Islam*, (Cambridge: Harvard University Press, 1996).

¹⁶Lihat Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Politik Muslim: Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Muslim*, alihbahasa Endi Haryono dan Rahmi Yunita, (Jogjakarta: Tiara Wacana, 1998), h. 5-6.

misalnya, seringkali isu-isu agama, gender atau kondisi fisik seseorang dijadikan standar kelayakan untuk menjadi pemimpin. Kecenderungan ini biasanya menguat menjelang diadakannya pemilihan pemimpin di suatu daerah atau bahkan menjelang dilangsungkannya Pemilihan Umum, baik untuk para calon legistalitif maupun Presiden.¹⁷

1. Isu-isu keagamaan (*religious issue*)

Beberapa kali, persoalan agama menjadi isu politik di Indonesia. Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 1999, 2004 dan 2009 selalu diwarnai isu agama. Pada Pilpres tahun 2004, istri calon Presiden Susilo Bambang Yodhoyono dianggap beragama Kristen karena kebetulan memiliki nama Kristiani Herrawati. Demikian juga pada Pilpres 2009, istri Calon Wakil Presiden Boediono dituduh beragama Kristen. Tuduhan-tuduhan ini secara politis jelas mengganggu pihak-pihak yang akan mencalonkan diri menjadi pemimpin.¹⁸

Isu religius, kembali muncul menjelang berlangsungnya pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2012. Rhoma Irama dianggap mempropaganda masyarakat untuk tidak memilih Gubernur atau wakilnya dari kalangan non muslim. Hal ini jelas dimaknai sebagai bentuk penolakan atas majunya Basuki Tjahya Purnama sebagai Wakil Gubernur Jakarta.

Beberapa hari menjelang dilaksanakannya Pemilu legislatif tahun 2014, Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (FUI MUI) memberikan preferensi kepada para pemilih untuk memberikan hak suaranya kepada para calon legistalif yang beragama Islam. Seruan ini jelas memberikan angin segar kepada beberapa Partai Politik yang berasaskan Islam untuk meraup suara sebanyak-banyaknya. Bahkan, partai seperti PKB yang biasanya keras menyuarakan inklusifisme keberagaman juga memanfaatkan seruan FUI MUI tersebut dan berharap simpati dari para pemilih muslim.¹⁹

2. Isu Gender

Salah satu isu yang mencuat pada pertarungan politik menjelang Sidang Umum MPR 1999 adalah isu mengenai presiden wanita.²⁰ Yang menarik dari isu

¹⁷Lihat Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 315-317.

¹⁸<http://politik.kompasiana.com/2012/07/20/>. Diakses pada tanggal 08 April 2014

¹⁹Lihat Republika, edisi Sabtu 5 April 2014, h. 1 dan 9. Diakses pada tanggal 8 April 2014.

²⁰Salahuddin Wahid, dkk, *NU Politik*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), h.. 217

ini adalah bahwa doktrin agama, sekali lagi, berperan dalam menentukan skenario kebangsaan di Indonesia, yang *notabene* nya menganut model pemerintahanh *nation state*.

Sebesar apapun polemik yang terjadi pada saat itu, namun kenyataannya, Megawati terpilih sebagai Presiden wanita pertama di Indonesia. Terpilihnya Megawati sebagai Presiden menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak lagi mendasari pilihannya dengan sentimen-sentimen tradisional seperti masalah budaya dan agama, melainkan mereka telah memasuki babak baru model pemilihan pemimpin yang lebih rasional.²¹

3. Isu kesempurnaan fisik

Teori fikih siyasah yang mensyaratkan bahwa seorang pemimpin harus sempurna secara fisik, juga pernah menjadi bahan diskusi hebat ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) akan maju menjadi Presiden RI. Banyak pihak yang menolak Gus Dur untuk maju menjadi Presiden, demikian pula tidak sedikit yang mendukungnya untuk terus maju. Kondisi Gus Dur yang berpenglihatan tidak sempurna dijadikan alasan oleh beberapa kalangan untuk menggajalnya maju menjadi Presiden RI. Namun demikian, Gus Dur tetap terpilih menjadi Presiden RI menggantikan BJ. Habibie.

4. Isu Kesukuan

Persoalan suku nampaknya juga sering menjadi isu sensitif menjelang dilangsungkannya pemilihan pemimpin di Indonesia. Dalam konteks pemilihan Daerah, di beberapa tempat seringkali muncul seruan untuk memilih kepada daerah yang satu suku dengan daerah tempat pemilihan. Bahkan isu suku ini seringkali menjadi senjata ampuh bagi para calon untuk mendapatkan suara dan sekaligus dapat dijadikan bahan untuk menyudutkan kandidat lain yang berasal dari suku yang berbeda.

Dalam konteks Pemilihan Presiden, Jawaisme sudah beberapa kali mewarnai proses pemilihan Capres dan Cawapres. Nampaknya, masyarakat Jawa, masih terlalu berat untuk melepaskan kursi kepresidenan dari tokoh-tokoh di luar Jawa.

²¹Dalam perspektif Weber, hanya negara-negara tradisional dan non Barat saja yang masih dipengaruhi secara kuat oleh oleh sistem kebudayaan dan agama. Sementara negara-negara modern dan Barat cenderung didasari oleh rasionalitas yang legal formal (*legal form an rastianality*). Lihat, Abdul Aziz, *Cheifdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*, (Jakarta: Alvabet, 2001), h. 55.

Hasilnya, dari keenam Presiden yang pernah memimpin bangsa Indonesia, hanya BJ. Habibie yang bukan berasal dari Jawa. Itupun keterpilihannya karena harus menggantikan posisi Presiden Suharto yang pada waktu itu harus mundur dari jabatannya.

Berdasarkan isu-isu di atas, nampak sekali bahwa masyarakat seringkali terjebak pada persoalan-persoalan *simbolis* mengenai kriteria pemimpin yang ideal. Padahal, dalam konteks negara modern, penentuan untuk memilih seorang pemimpin seharusnya tidak lagi disandarkan pada hal-hal yang *simbolik* apalagi yang bersifat *artifisial*. Dalam hal ini para pemilih seharusnya mendasarkan pilihannya pada pertimbangan-pertimbangan rasional mengenai kapabilitas seorang pemimpin dalam membawa sebuah bangsa atau negara menjadi lebih maju dan bermartabat.

Dalam konteks isu keagamaan misalnya, kriteria bahwa seorang pemimpin harus beragama Islam, dapat membawa umat Islam terjebak pada *simbolisme* dan *formalisme* keagamaan. Apalagi jika isu tersebut dikaitkan dengan proses pemilihan seorang pemimpin, maka politisasi agama sangat mungkin bisa terjadi. Padahal, keagamaan sejati dari seseorang tidak saja diukur dari apakah dia muslim atau tidak, melainkan juga dari sejauh mana dia mampu melakukan internalisasi ajaran-ajaran Islam dalam perilaku hidup sehari-hari. Dalam surat al-Ma'un misalnya, Allah SWT berfirman:

*Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan anak miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. (yaitu) orang-orang yang lalai dari salatnya. Orang yang berbuat riya. Dan enggan menolong dengan barang yang berguna.*²²

Terkait dengan hal ini, A. Yusuf Ali pernah mengatakan bahwa untuk bisa dikatakan beragama secara benar, maka kita harus melakukan empat hal, yaitu: 1) iman kita harus sejati dan tulus; 2) kita harus memperlihatkankannya dalam tindakan-tindakan kebaikan kepada sesama kita; 3) kita harus menjadi warga masyarakat yang baik, yang mendukung organisasi-organisasi sosial; dan (4) jiwa pribadi kita sendiri harus teguh dan tidak goyah dalam segala keadaan.²³

²²Q.S. Al-Ma'un (107): 1-7.

²³A. Yusuf Ali, *The Holy Qur'an, Translation and Commentary*, (Jeddah: Dar al-Qiblah 1403 H), h. 69

Simbolisme kepemimpinan juga nampak ketika gender dijadikan salah satu kriteria bagi seseorang untuk menjadi pemimpin. Lagi-lagi, justifikasi “agama” sering dijadikan dasar untuk memperkuat hegemoni kaum laki-laki atas perempuan. Padahal, diskusi mengenai gender sudah sampai pada taraf kesetaraan, dimana kaum wanita diberi hak yang sama sebagaimana laki-laki. Pihak-pihak yang tidak setuju dengan konsep kesetaraan ini, seringkali menafikan konteks dalam memahami sebuah teks. Seolah-olah sebuah teks itu mandiri sama sekali dari kondisi sosial, budaya dan politik yang melingkupinya. Selain itu, sejarah tentang keberhasilan beberapa perempuan di ranah publik, termasuk menjadi pemimpin, nampak luput dari kajian mereka. Padahal, beberapa perempuan muslim tercatat mampu berkkiprah secara maksimal di ranah publik, bahkan menjadi seorang pemimpin. Inilah konteks yang seharusnya dijadikan salah satu pertimbangan ketika memahami suatu teks.²⁴

Dalam hal kesempurnaan fisik dan latar belakang suku, persoalan *simbol* sekali lagi menjadi dasar dari penentuan kriteria pemimpin ideal. Padahal, dalam diskursus keislaman kesempurnaan fisik seseorang selalu dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan roda pemerintahan dengan maksimal. Artinya, aturan itu bersifat sosiologis, kasuistik dan temporal. Ia bukanlah aturan normatif yang harus dilaksanakan di setiap tempat dan waktu. Bisa jadi, seseorang yang tidak sempurna secara memiliki kecakapan lebih baik dari pada orang yang sempurna secara fisik. Dalam kasus ini tentunya pilihan yang rasional akan menempatkan mereka yang lebih cakap untuk memimpin, terlepas dari kondisi fisiknya.

Adapun mengenai latar belakang suku tertentu bagi calon pemimpin, sebenarnya bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan di Indonesia, disamping juga tidak memiliki dasar keagamaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Negara Indonesia adalah milik seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dan masing-masing mereka memiliki hak yang sama di mata hukum dan perundang-undangan, termasuk juga hak yang sama untuk menjadi pemimpin. Teks-teks keagamaan juga tidak ada yang menentukan bahwa suku tertentu lebih berhak dari pada suku yang lain untuk menjadi pemimpin. Kalaupun ada hadis tentang kelebihan suku Qurays untuk memimpin, ini, sekali lagi, sangatlah kasuistik. Konteks hadis tersebut adalah untuk bangsa Arab dan

²⁴Lihat, Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Jogjakarta: LKiS dan Fahmina Institut, 2007), h. 167-173.

dalam situasi tertentu. Padahal, Indonesia bukanlah Arab dan sudah barang tentu memiliki latar belakang sejarah, kondisi sosial, budaya dan politik yang berbeda dengan bangsa Arab.

Berdasarkan hal di atas, sudah seharusnya isu-isu simbolik tidak lagi dipertahankan untuk mencari pemimpin yang ideal. Ada banyak isu lain yang lebih esensial dan rasional untuk dijadikan kriteria pemimpin, misalnya: 1) jujur, 2) adil, 3) berwawasan, 4) tidak korup, 5) berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 6) tegas, dan lain sebagainya.

Terkait dengan hal ini menarik untuk dicermati pernyataan dari Ibn Taymiyyah:

الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة

“Allah akan menolong negara yang adil meskipun negara itu kafir. Dan Allah tidak akan menolong negara yang zalim meskipun negara itu mukmin (Islam).”²⁵

Umat Islam seharusnya bisa melihat bahwa negara-negara seperti Australia, Jepang, Korea, Negara-negara Eropa dan Amerika yang penduduknya mayoritas non muslim (kafir), tapi ternyata lebih maju dan sejahtera dibandingkan dengan negara-negara Islam seperti Mesir, Yaman, Aljazair, Oman, Libya dan Tunisia. Padahal mereka tidak mengenal ajaran Islam. Bukankah seharusnya umat Islam menjadi sebaik-baiknya umat seperti yang difirmankan Allah:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ
آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.

“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka: di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.²⁶

²⁵<http://politik.kompasiana.com/2012/07/20/>. Diakses pada tanggal 08 April 2014. Lihat juga Ibn Taymiyah, *Majmu’*, VI/ 322.

²⁶QS. Ali Imran (3): 110.

Fenomena majunya bangsa Barat dan terbelakangnya umat Islam, juga menjadi perhatian seorang pemikir Islam kontemporer Muhammad Abduh. Dalam sebuah kesempatan Abduh pernah mengatakan: “Saya melihat Islam di Barat tapi saya tidak temukan umat Islam di sana. Sebaliknya, saya menemukan kaum muslim di Timur tapi saya tidak melihat ada Islam di sana.” Dalam konteks ini Abduh nampaknya ingin mengatakan bahwa orang-orang Barat, meskipun tidak mengenal Islam, namun perilakunya mencerminkan ajaran Islam. Mereka menjunjung tinggi keadilan, giat bekerja, disiplin, memudahkan urusan orang lain, menjaga kebersihan dan ketertiban umum serta menghargai waktu.²⁷

Dengan demikian, apabila umat Islam ingin maju, maka kriteria pemimpin yang akan dipilih tidak lagi hanya didasarkan pada hal-hal yang simbolik semata, melainkan juga menyangkut persoalan-persoalan yang lebih esensial. Dalam hal ini ada kaidah fikih yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya, harus mengacu pada kemaslahatan (kebaikan) rakyat”.²⁸

Oleh karenanya, salah kriteria pemimpin yang ideal di masa sekarang adalah pemimpin yang mampu menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang dipimpinnya. Kebijakan yang dibuat juga tidak didasari oleh kepentingan pribadi, melainkan kepentingan dan kebaikan seluruh rakyat.

D. Simpulan

Persoalan dalam menentukan kriteria pemimpin yang ideal memang selalu memunculkan perbedaan pendapat. Ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan pemimpin yang ideal bukanlah persoalan yang mudah. Para ulama sudah merumuskan beberapa kriteria, namun kondisi riil di masyarakat justru menunjukkan bahwa pemimpin dengan kriteria yang mereka rumuskan sangat sulit untuk didapatkan.

²⁷<http://politik.kompasiana.com/2012/07/20/>. Diakses pada tanggal 08 April 2014

²⁸Jalaluddin as-Suyûti, *Al-Asybah wa an-Nazâir*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), h. 185.

Dalam konteks masyarakat muslim modern, terdapat dua arus besar pemikiran yang berkembang dalam memaknai pemimpin ideal. *Pertama*, mereka yang pemikirannya bercorak *simbolis-tradisional*. Kriteria pemimpin menurut kelompok ini lebih banyak ditentukan oleh simbol-simbol religius, fisik, gender dan kesukuan. Oleh karenanya pemimpin yang ideal menurut mereka adalah yang muslim, laki-laki, sempurna secara fisik dan berasal dari suku tertentu. Bahkan kelompok ini selalu mengupayakan agar model pemerintahan mengikuti konsep *dawlah islamiyyah*.

Kedua, mereka yang pemikirannya lebih bercorak *esensialis-modern*. Kelompok ini memilih model *nation-state* sebagai model pemerintahannya. Ajaran Islam tidak harus diformalkan dalam bentuk sebuah negara (Negara Islam), melainkan negara yang harus mentransformasi nilai-nilai keislaman, meskipun dalam bentuk *nation-state*. Dalam hal kepemimpinan, kelompok ini juga tidak mudah terjebak pada isu-isu *simbolik-artifisial*, melainkan mencoba memahami kepemimpinan dalam konteks yang lebih mendasar dan substantif. Isu-isu seputar keadilan, kesejahteraan dan kesetaraan jauh lebih mereka utamakan daripada isu agama, gender, fisik maupun kesukuan.

REFERENSI

- Ali, A. Yusuf, *The Holy Qur'an, Translation and Commentery*, Jeddah: Dar al-Qiblah 1403 H.
- Amin, Ahmad, *Duha al-Islam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010.
- Arif, Abd Salam, "Politik Islam antara Aqidah dan Kekuasaan Negara". Dalam A. Maftuh Abegebriel dkk. *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedi*, Jogjakarta: SR-Ins Publishing, 2004.
- Aziz, Abdul, *Cheifdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*, Jakarta: Alvabet, 2001.
- Eikelman, Dale F, dan Piscatori, James, *Politik Muslim: Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Muslim*, Alihbahasa Endi Haryono dan Rahmi Yunita. Jogjakarta: Tiara Wacana, 1998.
- Hanbal, Ahmad Ibn, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Beirut: Alam al-Kutub, 1998.
- Hitti, Philip K., *History of The Arab*, Alihbahasa R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi, 2005.

- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usul Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Al-Mawardi, Abu Hasan, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Jogjakarta: LKiS dan Fahmina Institut, 2007.
- Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Roy, Oliver, *The Failure of Political Islam*, Cambridge: Harvard University Press, 1996.
- Said, Imam Ghazali dan Ansori, A. Ma'rud (Peny), *Solusi Problematika Hukum Islam: Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-1999)*, Surabaya: LTNU Jawa Timur dan Penerbit Diantama, 2005.
- Shaliba, Jamil, *Tarikh al-Falsafah al-Arabiyyah*, Beirut: As-Syirkah al-Alamiyah li al-Kitab, 1989.
- As-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Asybah wa an-Nazhair*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010.
- Taymiyyah, Ibn, *Majmu' Fatawa*, T.p: Wizarah asy-Syu'un al-Islamiyah wa al-Awqaf wa ad-Da'wah wa al-Irsyad bi al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'udiyah, t.th.
- Wahid, Salahuddin, dkk. *NU Politik*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Az-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.
- <http://politik.kompasiana.com/2012/07/20/>.
- Republika, edisi Sabtu 5 April 2014.